

PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS X

No.	Materi	Rekomendasi	PIC
1.	Melakukan kerjasama “internasional” dengan sesama Asosiasi atau Institusi yang langsung tidak langsung mendukung industri .	Upaya mencari network Internasional (Asosiasi Jasa pengiriman Express Internasional).	WAKETUM
2.	Perlu adanya “database” keanggotaan seluruh Indonesia yang valid.	Perlu dibuat system administrasi dan informasi kesekretariatan ASPERINDO yang dapat digunakan secara seragam oleh DPP/DPW/DPD.	WAKETUM
3.	Kemudahan tatacara penerimaan anggota baru.	Merubah system penerimaan secara manual yang dilakukan selama ini ke system “on line”.	SEKJEN
4.	Dipertanyakan kemandirian DPW dan DPD karena unsur “pembinaan” dari DPP dirasa “minim” (DPW Jawa Barat).	DPP akan melakukan kunjungan ke DPW Jawa Barat (dan DPW lainnya) dengan frekuensi kunjungan minimal sekali dalam setahun.	SEKJEN
5.	Optimalisasi pembentukan DPD di seluruh Indonesia.	Pelaksanaan secara optimal oleh DPW – DPW.	SEKJEN
6.	Legalitas usaha – usaha online shop (Tokopedia, Lazada, Shopee dll).	ASPERINDO (DPP) akan beraksi di KPPU.	SEKJEN
7.	Kebijakan Pemerintah memberikan perlindungan bisnis kepada anggota ASPERINDO untuk mencegah terjadinya	ASPERINDO akan memberikan kesaksian di KPPU.	SEKJEN

No.	Materi	Rekomendasi	PIC
	kebebasan didalam memberikan “diskon ongkir” kepada pengguna jasa.		
8.	Penggunaan TLC yang telah dipersiapkan oleh DPP.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Setuju diimplementasikan penggunaannya oleh Perusahaan anggota. ❖ Mandatory bagi penyelenggara pos melalui KOMINFO. 	RHP
9.	Masukan kepada Pemerintah terkait kemudahan ekspor impor – Peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Agar terus dilakukan meskipun hal tersebut telah dilaksanakan. ❖ Mendorong anggota untuk aktif mengikuti hal – hal/seminar/webinar yang berkaitan dengan perkembangan ekspor impor. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ RHP ❖ O&A
10.	Mengusahakan agar ASPERINDO dapat difungsikan sebagai pemberi Rekomendasi bagi anggotanya untuk perpanjangan ijin operasi.	Akan diusahakan (kembali).	RHP
11.	Mendorong Pemerintah untuk membatasi perijinan bagi Perusahaan asing. Alasan : akan berdampak pada Perusahaan lokal.	Berkirim surat ke Pemerintah/KOMINFO.	RHP
12.	Syarat penerimaan anggota, termasuk yang tidak memiliki SIPP akan tetapi beroperasi juga dibidang usaha jasa pengiriman.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggota tetap harus yang memiliki SIPP. ❖ Untuk yang NON SIPP boleh menjadi anggota akan tetapi menginduk kepada Perusahaan anggota yang menunjuk 	O&A

No.	Materi	Rekomendasi	PIC
		sebagai “Agen” melalui “Surat penunjukan Keagenan”.	
13.	Masing – masing daerah agar memiliki tariff handling untuk kepentingan kolaborasi sesama Perusahaan anggota.	DPP agar mendorong terjadinya kolaborasi antara Perusahaan anggota di daerah dan pusat untuk terwujudnya tarif.	O&A
14.	Keamanan barang kiriman dan pungutan liar.	Tindak lanjut kerjasama dengan pihak Kepolisian.	O&A
15.	Penurunan tariff SMU (Surat Muatan Udara).	DPP agar terus melanjutkan usaha untuk menurunkan tariff SMU.	TRANSP – I/S
16.	Pelaksanaan kewajiban/mandatory Sertifikasi Kompetensi Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melanjutkan program pelatihan yang megarah kepada sertifikasi kompetensi. ❖ Terus berupaya agar LSP – PLI memperoleh akreditasi dari BNSP (Badan nasional Sertifikasi Profesi). 	SDM/PENDIDIKAN
17.	Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kerjasama pembentukan “prodi” bidang usaha jasa pengiriman ekspres khususnya di perguruan tinggi swasta baik pada jenjang D-1 maupun D3. - Training Certificate yang diterbitkan oleh DPW dapat di approve/ditandatangani oleh ATC Jakarta. 	Menjadi program kerja bidang pendidikan.	SDM/PENDIDIKAN

No.	Materi	Rekomendasi	PIC
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan/penyelenggaraan sertifikasi bidang pendidikan oleh DPP. 		
18.	Program ALIS agar disosialisasikan ke tingkat Wilayah dan Daerah.	Sepakat untuk dilaksanakan – program ALIS dan Synergy One.	IT
19.	Kehumasan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaktifan website dan medsos ASPERINDO lainnya apabila mungkin terintegrasi dengan medsos DPW. - Evaluasi koordinasi dan forum komunikasi antara Wilayah dan Korwil. 	DPP merancang system informasi dan administrasi kekinian, termasuk pengoptimalisasian fungsi kehumasan.	HUMAS
20.	Kerjasama bisnis proyek – proyek Nasional.	Membentuk “Bidang Kerjasama Bisnis” yang antara lain berfungsi untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi ke daerah (DPW/DPD). - Koordinasi/rekomendasi agar penanganan (handling) proyek antar wilayah dilaksanakan oleh anggota ASPERINDO yang dikoordinir oleh DPW. - Mendorong pihak ketiga (misalnya AP Kargo) untuk memberikan layanan atau tariff khusus bagi anggota ASPERINDO (manfa’at menjadi anggota). 	HKU
21.	Keseragaman menyangkut identitas ASPERINDO – tulisan, design, nama (logo pada Kop Surat, Kartu Nama dll).	Segera membuat standar identitas organisasi.	SEKJEN/SEKRETARIAT

No.	Materi	Rekomendasi	PIC
22.	Upaya meringankan beban/biaya logistik di sektor : sewa gudang, SMU, tariff TOL, Karantina.	Perlu diupayakan.	BERSAMA
23.	Dukungan bagi Koperasi ASPERINDO untuk mengusahakan penggunaan freighter berjadwal.	Catatan : terbentur berbagai kendala, freighter belum dapat dioperasikan melalui Koperasi ASPERINDO.	KOPERASI
24.	Pelayanan Koperasi ASPERINDO untuk kepentingan Anggota.	Pelayanan di bidang trucking, gudang bersama dan kebutuhan layanan lainnya.	KOPERASI

==oo0oo==